



standar kompetensi kerja dan program pelatihan standar 1 - 4

Moh. Amir Syarifuddin

Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
Ditjen Binalavotas – Kementerian Ketenagakerjaan

@stankom.vokasi



01 Standar 1 : **Kompetensi Kerja**

02 Standar 2 : **Program Pelatihan Kerja**

03 Standar 3 : **Materi Pelatihan**

04 Standar 4 : **Asesmen Pelatihan Kerja**

05 Standar 5 : **Instruktur & Tenaga Pelatihan**

06 Standar 6 : **Sarana dan Prasarana**

07 Standar 4 : **Tata kelola**

08 Standar 5 : **Pengelolaan Keuangan**

KMPI

Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia

KEPUTUSAN DIRJEN BINALAVOTAS NOMOR
2/ 771/HK.05/III/2023 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PROGRAM DAN MATERI PELATIHAN
BERBASIS KOMPETENSI

Website kemnaker

01. <https://skkni.kemnaker.go.id/>

02. <https://proglat.kemnaker.go.id/>

03. <https://e-training.kemnaker.go.id/>

04. <https://inaskills.kemnaker.go.id/>

<https://ejabatan.kemnaker.go.id/>

Jenis standar kompetensi

1

**STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA (SKKNI)**

2

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS

3

**STANDAR KOMPETENSI KERJA
PROFESIONAL (SKKI)**

**NI
K
I**

PETA OKUPASI

Strategi Peningkatan Kompetensi SDM





ALUR PROSES PENETAPAN dan PENGEMBANGAN SKKni

1. **Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional** adalah tatanan keterkaitan komponen standarisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sinergis dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia.
2. **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)** adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Rencana Induk Pengembangan SKKNI** yang selanjutnya disebut RIP SKKNI adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI yang disusun oleh instansi teknis.
4. **Pengembangan SKKNI** adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI.
5. **Penerapan SKKNI** adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka implementasi SKKNI di bidang pendidikan vokasi/keterampilan, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi kerja serta manajemen dan pengembangan sumber daya manusia.
6. **Harmonisasi SKKNI** adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka kerja sama saling pengakuan SKKNI dengan standar kompetensi kerja lain, baik di dalam maupun di luar negeri guna mencapai kesetaraan dan/atau pengakuan.
7. **Kaji ulang SKKNI** adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap SKKNI agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.

PENETAPAN dan penggunaan SKKNI

No.	SKK dan KKNi	Status SKK			K/L Teknis
		Pene-ta pan	Dica-bu t	Ber-lak u	
A.	Standar Kompetensi Kerja (SKK)	1209	167	1042	114
1.	SKK Nasional Indonesia	1064	167	897	38
2.	SKK Khusus	144	0	144	75
3.	SKK International	1	0	1	1
B.	Kerangka Kulaifikasi Nasional Indonesia (KKNi)	107	7	100	38



Jumlah Unit Kompetensi : 33.352
(Data SKKNI, <https://skkni.kemnaker.go.id/>)

Program Pendidikan & Pelatihan Vokasi
 - Program Pelatihan : 1.619 Program
 - Modul Pelatihan : 1.048 Modul
(Data Proglat, <https://sproglat.kemnaker.go.id/>)

Skema Sertifikasi
 - Skema Uji Kompetensi : 3.786 Skema
 - dengan 2.402 LSP
(Data BNSP, bnsp.go.id)



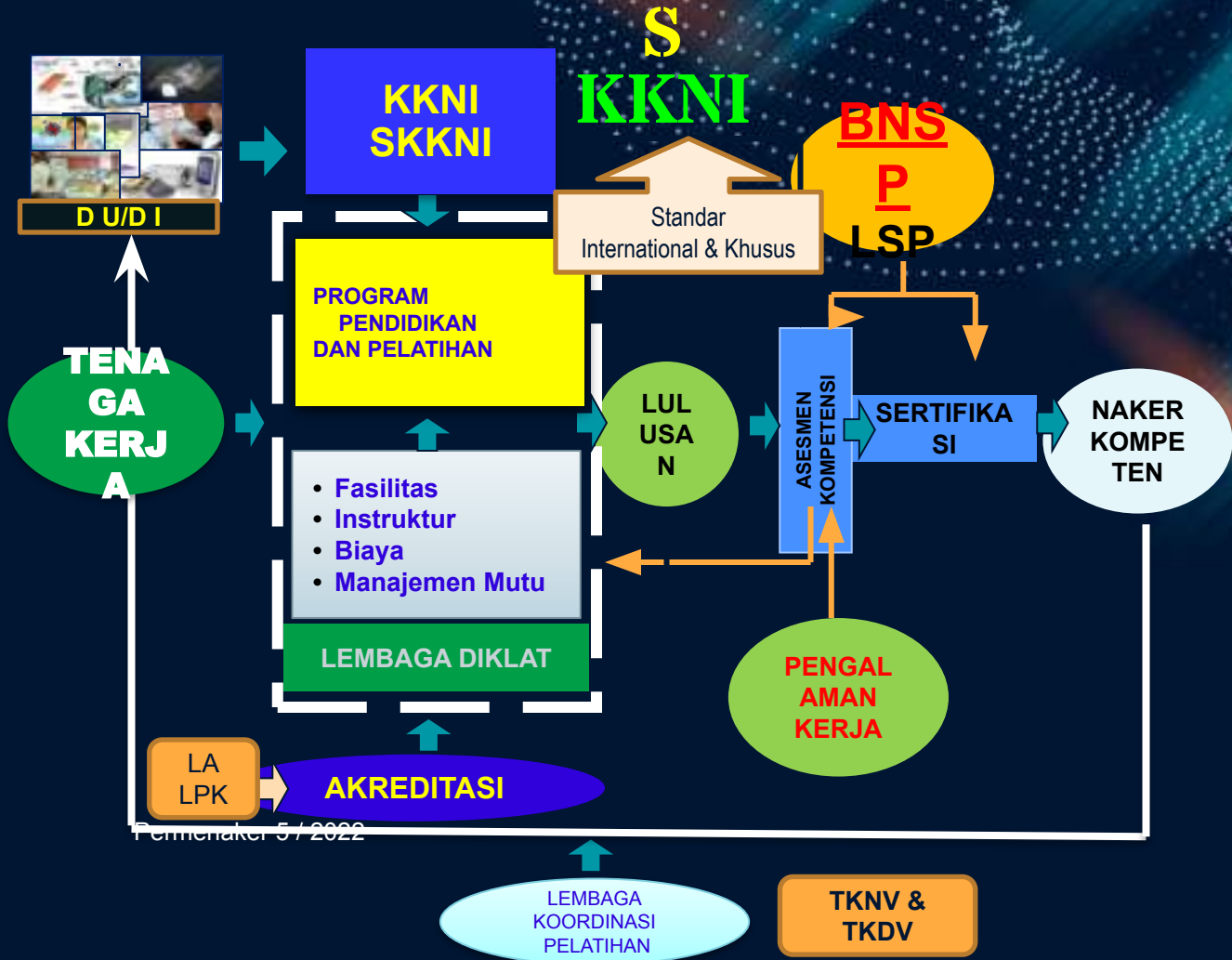
JUMLAH JABATAN DALAM DOKUMEN

Kerangka kualifikasi nasional Indonesia (kkn)

No.	Kementerian/Lembaga	Jumlah Dok_KKNI	Jumlah	Jenjang Kualifikasi										Jumlah Sub Bidang
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	0	
JUMLAH		110	5.981	160	991	963	1.007	984	753	479	345	239	60	397
1.	Badan Informasi Geospasial	1	63	-	1	3	7	14	18	11	7	2	-	7
2.	Bank Indonesia	2	370	-	-	-	152	132	86	-	-	-	-	14
3.	Kementerian Agama	1	22	-	-	3	3	4	6	4	2	-	-	-
4.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	2	6	-	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-
5.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2	99	-	-	22	3	34	12	21	7	-	-	17
6.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	10	200	15	47	48	32	44	12	2	-	-	-	2
7.	Kementerian Kesehatan	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
8.	Kementerian Ketenakerjaan	11	287	11	30	52	57	66	45	26	-	-	-	24
9.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2	69	-	-	19	11	21	15	3	-	-	-	2
10.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3	49	3	7	13	16	5	4	1	-	-	-	3
11.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3	133	-	25	38	34	19	17	-	-	-	-	19
12.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4	2.435	92	367	296	297	314	238	285	258	231	57	64
13.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristekdikti	4	151	-	9	23	31	29	36	22	1	-	-	10
14.	Kementerian Perdagangan	6	215	-	26	50	56	49	26	8	-	-	-	12
15.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	1	4	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
16.	Kementerian Perindustrian	25	1.214	16	385	297	220	154	98	24	20	-	-	86
17.	Kementerian Pertanian	18	441	23	93	82	62	50	70	22	38	-	1	95
18.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	2	22	-	-	-	-	2	4	4	6	5	1	-
19.	Otoritas Jasa Keuangan	11	146	-	-	11	20	42	47	26	-	-	-	33
20.	Perpustakaan Nasional	1	53	-	-	4	4	5	17	18	5	-	-	7

PP 31/2006
Sistem
Pelatihan
Kerja
Nasional

Perpres
68/2022
Revitalisasi
diklat
vokasi



Permenaker 5/2022

TERIMA

KASIH